

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam kehidupan masyarakat, relasi antara gereja dan pemerintah merupakan satu aspek penting dalam membentuk keteraturan sosial dan kehidupan bersama yang harmonis. Gereja memiliki peran dalam memberikan nilai-nilai moral, etika, serta pedoman hidup bagi masyarakat, sedangkan pemerintah berperan dalam mengatur kehidupan sosial melalui kebijakan dan sistem hukum yang berlaku. Kedua unsur ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, adil dan sejahtera. Tapi dalam praktiknya, relasi antara gereja dan pemerintah sering kali menghadapi berbagai dinamika yang dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan, cara pandang, serta perkembangan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, relasi antara gereja dan pemerintah menjadi hal yang penting untuk dipahami secara lebih mendalam agar keduanya dapat menjalankan perannya secara seimbang dalam kehidupan masyarakat.

Relasi antara gereja dan pemerintah di Indonesia menunjukkan dinamika yang tidak selalu stabil. Pada satu waktu, keduanya dapat berjalan dalam hubungan yang harmonis, namun pada waktu lain justru diwarnai oleh berbagai ketegangan. Konflik yang muncul umumnya berkaitan dengan

ketidakmampuan pemerintah dalam menjamin kebebasan beragama serta menyediakan fasilitas yang memadai bagi warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Selain itu, ketegangan juga dapat terjadi ketika gereja menilai bahwa kebijakan atau praktik kenegaraan tidak sejalan dengan nilai-nilai gerejawi, terutama ketika pemerintah dianggap kurang terbuka terhadap prinsip-prinsip yang dipegang oleh gereja. Kedua unsur ini akan selalu berinteraksi dalam mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, seperti pengambilan keputusan bersama, penyelesaian konflik, serta pembentukan nilai dan norma dalam masyarakat. Sehingga kehadiran gereja memberikan dasar norma dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, relasi gereja dan pemerintah dalam kehidupan masyarakat Hal ini tidak bisa dilepaskan dari latar sosial dan budaya yang memengaruhi dinamika kehidupan bersama.

Kondisi tersebut juga dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat di Lembang Saloso. Dalam beberapa situasi, relasi gereja dan pemerintah dan nilai-nilai gereja tidak selalu berjalan secara seimbang sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya sikap atau pernyataan dari pemimpin dalam lembaga pemerintahan yang lebih terkesan lebih menekankan pada kepentingan pribadi dan kelompok tertentu tanpa memperhatikan nilai-nilai kegerejaan yang selama ini menjadi pedoman yang mengikat kehidupan masyarakat di Lembang Saloso. Situasi ini jelas menimbulkan berbagai pandangan di tengah masyarakat, karena

masyarakat menilai bahwa pemimpin tersebut yang seorang dari pemerintahan seharusnya memperhatikan nilai-nilai dan ajaran gereja dalam menjalankan kepemimpinan. Ketika relasi pemerintah dan gereja tidak terbangun secara baik, hal tersebut dapat memengaruhi keharmonisan kehidupan masyarakat serta cara masyarakat memandang peran kedua lembaga tersebut dalam kehidupan bersama.

Kalau melihat situasi di Saloso, merupakan satu wilayah yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya lokal yang masih kuat dalam tradisi masyarakat. Tradisi, nilai adat dan pola relasi sosial di tengah masyarakat Lembang Saloso tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap cara mereka mereka bergereja dalam hal ini gereja dan kehidupan bernegara. Dalam praktiknya, hubungan Gereja dan pemerintah sering kali tidak berdiri secara terpisah, melainkan berinteraksi dengan nilai-nilai budaya lokal yang telah diwariskan secara turun temurun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya lokal di Lembang Saloso memiliki pengaruh penting terhadap pola interaksi antara gereja dan pemerintah dalam masyarakat.

Di lain sisi, dinamika yang terjadi di masyarakat Lembang Saloso memperlihatkan bahwa adanya tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai teologis dengan praktik budaya lokal, khususnya dalam relasi gereja dengan pemerintah. Tidak jarang terjadi ketegangan ketidakseimbangan

antara tuntutan iman Kristen dengan praktik adat yang berkembang di masyarakat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alosius Des Afriando Sinuraya menunjukkan bahwa pemikiran A. A. Yewangoe dapat dipahami sebagai bentuk teo-nasionalisme, yakni upaya mengintegrasikan ajaran Kristen dengan konteks sosial dan budaya Indonesia dalam rangka membangun masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada analisis pemikiran Yewangoe dari segi intelektual, teologis, dan eklesiologis dalam merespons berbagai persoalan sosial, politik, dan demokrasi di Indonesia. Fokus utama diarahkan pada cara Yewangoe memadukan ajaran Kristen dengan nilai-nilai sosio-kultural Indonesia guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis. Ia menegaskan bahwa gereja tidak bersifat pasif, melainkan memiliki tanggung jawab aktif dalam menghadirkan tatanan sosial yang adil melalui integrasi nilai-nilai Kristiani dengan kearifan lokal. Pemikiran ini sekaligus mendorong gereja dan umat Kristen untuk lebih sadar akan peran mereka di ruang publik, serta mengkritisi pandangan yang memisahkan gereja dari realitas sosial. Dengan demikian, gagasan Yewangoe memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang peran gereja dalam membangun masyarakat Indonesia yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Penelitian yang dilakukan oleh Harming dan rekan-rekan mengkaji latar belakang keilmuan Andreas A. Yewangoe, khususnya dalam bidang dogmatika. Seiring perkembangannya, Yewangoe semakin menunjukkan kecenderungan keahliannya dalam kajian gereja dan masyarakat. Pada umumnya, studi dogmatika hanya berfokus pada persoalan doktrin dan kehidupan gereja, namun hal ini berbeda dengan Yewangoe. Sebagai seorang dogmatikus, ia justru lebih banyak menaruh perhatian pada isuisu yang berkaitan dengan relasi gereja dan masyarakat dalam berbagai karya tulisnya. Meskipun demikian, ia tetap menghasilkan tulisan di bidang dogmatika, walaupun jumlahnya tidak sebanyak karya yang membahas gereja dan masyarakat. Dalam menelusuri pemikiran Yewangoe, penulis menggunakan pendekatan kepustakaan dengan metode kualitatif agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa studi dogmatika yang dipelajari Yewangoe, khususnya ketika berada di Belanda, memiliki cakupan yang luas hingga mencakup persoalan gereja dan masyarakat. Selain itu, pemikirannya juga dipengaruhi oleh latar belakang sosial, politik, dan ekonomi di daerah asalnya di Sumba, Nusa Tenggara, serta keterlibatannya dalam gerakan oikoumene.¹

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jeni Murni dan rekan-rekan mengkaji peran Gereja Kristen dalam pemerintahan sepanjang

¹ Alex Stefanus Ginting; Sabda Jurnal Kristen (2025), Hlm. 215.

sejarah, khususnya dalam konteks dunia Barat. Sejak awal perkembangannya, Kekristenan telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam ranah sosial dan politik, terlebih setelah diakui sebagai agama resmi dalam Kekaisaran Romawi pada abad ke-4. Pada masa tersebut, gereja tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga memiliki otoritas dalam aspek sosial, moral, dan hukum, terutama di Eropa pada Abad Pertengahan. Melalui penerapan hukum kanon, gereja turut mengatur berbagai dimensi kehidupan masyarakat, seperti pernikahan, warisan, serta norma-norma sosial, sekaligus memberikan legitimasi terhadap kekuasaan politik melalui gagasan tentang hak ilahi. Namun demikian, munculnya Reformasi Protestan pada abad ke-16 membawa perubahan mendasar, khususnya dalam hal pemisahan antara otoritas gereja dan negara, yang kemudian menjadi salah satu dasar bagi berkembangnya sistem pemerintahan sekuler. Gereja-gereja Protestan yang baru juga menekankan kebebasan beragama serta otonomi individu, yang berkontribusi pada lahirnya nilai-nilai pluralisme dan demokrasi modern. Dalam konteks masa kini, meskipun keterlibatan formal gereja dalam struktur pemerintahan telah mengalami penurunan, perannya tetap terlihat melalui kontribusi moral dalam berbagai isu sosial, keadilan, dan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa

peran Gereja Kristen dalam pemerintahan mengalami transformasi, dari kekuatan yang bersifat politis dan yuridis menuju peran moral dan sosial yang lebih inklusif dalam masyarakat modern yang semakin sekuler.²

Penelitian sebelumnya yang di kaji oleh Immanuel dan kawan kawan membahas Analisa ini mengeksplorasi keterlibatan gereja dalam politik aktif di Indonesia, yang dimulai dengan menganalisis peran serta gereja terhadap dinamika hubungan antara institusi kegereja an dan Negara. Dengan pertimbangan sejarah, konteks social, dan dampak kebijakan public, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tantangan dan peluang yang dihadapi gereja. Fokus utama adalah bagaimana keterlibatan ini mempengaruhi masyarakat, identitas religious, dan keberlanjutan demokrasi. Temuan menunjukkan bahwa keterlibatan gereja dapat menjadi kekuatan positif maupun negative, tergantung pada konteks yang diusung. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi untuk penyimpangan politik, keterlibatan gereja yang konstruktif dapat memperkuat demokrasi partisipasi masyarakat dalam proses politik.³

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, dapat dilihat bahwa kajian mengenai pemikiran Andreas A. Yewangoe umumnya

² Jeni Murni Gulo, Arismawati Halawa and Malik Bambang, "Peran Gereja Dalam Pemerintah Sejarah Tentang Gereja Kristen (2025) Hlm. 145.

³ Jurnal Penelitian et al., "Gereja Dalam Politik Aktif Di Indonesia" 8, no. 12 (2024):hlm. 226

lebih banyak menyoroti perannya dalam membangun teologi publik, keterlibatan gereja dalam demokrasi, serta relasi gereja dengan kehidupan sosial dan politik di Indonesia secara umum.

Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran penting mengenai kontribusi pemikiran Yewangoe dalam melihat hubungan antara gereja, masyarakat, dan negara. Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis relasi antara gereja dan pemerintah dalam perspektif teologis dengan menggunakan pemikiran Andreas A. Yewangoe serta mengaitkannya dengan konteks kehidupan masyarakat lokal masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara teologis relasi antara gereja dan pemerintah dalam bingkai pemikiran Andreas A. Yewangoe serta melihat bagaimana relasi tersebut dipahami dalam konteks kehidupan masyarakat di Lembang Saloso. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memperkaya kajian mengenai relasi gereja dan pemerintah, khususnya dalam perspektif teologi kontekstual di tengah kehidupan masyarakat.

B. Fokus Masalah.

Analisis Perspektif Teologi Relasi gereja dan pemerintah dalam Praktik budaya lokal berdasarkan bingkai pemikiran Andreas A. Yewangoe di Lembang Saloso.

C. Rumusan Masalah.

Bagaimana relasi gereja dan pemerintah dalam praktik budaya lokal berdasarkan perspektif Yewangoe di Lembang Saloso?

D. Tujuan Penelitian.

Adapun Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis dan menguraikan relasi gereja dan pemerintah dalam praktik budaya lokal di Lembang Saloso seperti pada rumusan masalah.

E. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian teologi, khususnya dalam bidang teologi publik yang membahas relasi gereja dan pemerintah. Penelitian ini juga dapat memperkaya pemahaman teologis mengenai pemikiran Andreas A. Yewangoe tentang hubungan gereja dan pemerintah dalam kehidupan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada gereja dan masyarakat mengenai pentingnya membangun relasi yang baik antara gereja dan pemerintah dalam kehidupan sosial. penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan

refleksi bagi gereja agar mampu menjalankan perannya secara konstruktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mendorong pemerintah untuk tetap memperhatikan nilai-nilai moral dan spritual dalam menjalankan setiap kebijakan-kebijakan yang di ambil.

F. Sistematika Penulisan.

Adapun sistematika penulisan diatur sebagai berikut:

BAB I: BAB I membahas latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II: Membahas tentang pengertian gereja, pengertian pemerintah atau negara, konsep teologi publik, pemikiran Andreas A. Yewangoe, serta perspektif teologis mengenai relasi gereja (gereja) dan pemerintah.

BAB III: bab ini menjelaskan jenis penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis data, serta teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian.